

ISSN 0854 - 7254

Dinamika HUKUM

JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM

Hak Atas Lingkungan Hidup
Oleh: Mustofa

Remunerasi Polri dan Malapraktik Profesi
Oleh: Bambang Satriya

Suap dan Birokrasi Polri
Oleh: M. Taufik

Illegal Fishing
Oleh: Moh. Muhibbin

Membaca Jaringan Terorisme
Oleh Fanny Tanuwijaya

Euthanasia Masalah Dan Pemecahannya
Oleh : Rahmatul Hidayati

**Eksistensi Hak Reproduksi Tenaga Kerja Perempuan
(Perspektif Hak Asasi Manusia)**
Oleh: Mirin Primudyastutie

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Kajian Hak Asasi Manusia)**
Oleh: Anik Malikhah

Pencari Keadilan dan Bantuan Hukum
Oleh: Anang Sulistyono

Kebijakan Pemerintah Atau *Freies Ermessen*: Bisakah Dipertanggung Jawabkan ?
Oleh : Diyan Isnaeni

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Di Negara Hukum
Oleh: Ana Rahmatussa'diyah



FAKULTAS HUKUM
UNISMA

Edisi Tahun XVII No.34, Maret 2011

JURNAL ILMIAH

Dinamika HUKUM

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum

Pimpinan Redaksi

Drs. H. Abdul Wahid, SH., MA.

Sekretaris Redaksi

Sunardi, SH., MH.

Konsultan Redaksi

Prof. Dr. Ahmad Sodiki, SH.
Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.
A.M. Yunus Rasyid, MA., Ph.D.
Dr. Kasuwi Saiban, MA.
Umar Said Sugiharto, SH., MS.

Redaksi Pelaksana

Prof. Dr. H. Mustofa, SH., MSi.
Umar Said Sugiharto, SH., MS.
Sulasyiah Amini, SH., Sp.N.
Abdul Rochim, SH., MH.
Budi Parmono, SH.
Mariyadi, SH., MH.
Diyan Isnaeni, SH., MH.

Pelaksana Tata Usaha

Ana Rochmatus S., SH., MH.
Moh. Ashim, SH.
Nur Farida, SH.

Alamat Redaksi

Fakultas Hukum UNISMA
Jl. MT. Haryono 193 Dinoyo
Malang Telp. (0341) 581613
e-mail : ifaha@plasa.com

ISSN 0854 - 7254

isi diluar tanggung jawab
percetakan

Dari Redaksi

Ibarat pepatah yang seringkali diperkenalkan dalam dunia hukum, "dimana ada masyarakat, di situ ada hukum atau dimana ada hukum, di situ ada masyarakat", artinya keberadaan masyarakat tidak akan terlepas dari norma-norma yuridis. Norma-norma yuridis menjadi dibutuhkan oleh masyarakat karena di tengah masyarakat memerlukan tatanan atau norma-norma yang mengaturnya. Dengan norma yang mengaturnya ini, bangunan masyarakat diharapkan terjaga dan berkembang menjadi lebih baik dan progresif.

Sayangnya, tidak selalu anggota masyarakat itu menjadi subyek yang selalu patuh atau taat pada peraturan perundang-undangan. Banyak anggota masyarakat yang terpaksa atau sengaja menjadi pelanggar norma. Mereka ini menjalankan aktifitas yang bertentangan dengan norma hukum, padahal norma hukum ini sudah dikenal dan dipahaminya. Mereka masih saja memilih jalan yang tidak selaras dengan norma yang berlaku.

Jurnal Dinamika Hukum yang terbit dalam edisi kali ini juga mendeskripsikan soal beberapa pola pelanggaran hukum atau model perilaku menyimpang di masyarakat. Perilaku menyimpang ini ditelaah oleh para pakar sesuai dengan bidang kajiannya, di samping model perilaku lainnya di masyarakat.

Redaksi

DAFTAR ISI

JURNAL ILMIAH *Dinamika* HUKUM

Hak Atas Lingkungan Hidup <i>Oleh: Mustofa</i>	1
Remunerasi Polri dan Malapraktik Profesi <i>Oleh: Bambang Satriya</i>	8
Suap dan Birokrasi Polri <i>Oleh: M. Taufik</i>	14
Illegal Fishing <i>Oleh: Moh. Muhibbin</i>	20
Membaca Jaringan Terorisme <i>Oleh Fanny Tanuwijaya</i>	27
Euthanasia Masalah Dan Pemecahannya <i>Oleh : Rahmatul Hidayati</i>	33
Eksistensi Hak Reproduksi Tenaga Kerja Perempuan (Perspektif Hak Asasi Manusia) <i>Oleh: Mirin Primudyastutie</i>	45
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kajian Hak Asasi Manusia) <i>Oleh: Anik Malikhah</i>	53
Pencari Keadilan dan Bantuan Hukum <i>Oleh: Anang Sulistyono</i>	59
Perlindungan Hak Konsumen <i>Oleh: Sulasyiah Amini</i>	65
Kebijakan Pemerintah Atau <i>Freies Ermessen</i>: Bisakah Dipertanggung Jawabkan ? <i>Oleh : Diyan Isnaeni</i>	72
Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Di Negara Hukum <i>Oleh: Ana Rahmatussa'diyah</i>	80
Keadilan Ekonomi <i>Oleh: Moch. Arifin</i>	87

JURNAL ILMIAH *Dinamika* HUKUM. Redaksi mengundang secara terbuka kepada seluruh kalangan untuk menuliskan gagasan-gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi Hukum. Redaksi dapat mengungkap dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya "untuk tulisan yang dimuat akan disediakan honorarium yang pantas, naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan".

ILLEGAL FISHING

Oleh: Moh. Muhibbin
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang)

Abstract

Everybody confesses that Indonesia's marine wealth is tremendous. Though this marine potency is clearly the nation's asset, it is not always able to be expected to bring advantages for people if Indonesian people tend to destroy or trap in the practice of capitalism and dehumanization of marine wealth or by doing illegal fishing. This huge potency can be damaged one day if people's greediness is uncontrolled.

Keywords: *marine wealth, people's greediness*

Salah satu problem besar yang tidak boleh dinafikan oleh pilar bangsa adalah pencurian atau penjarahan kekayaan hasil laut. Ulah penjarah telah membuat anatomi kehidupan laut Indonesia tercabik-cabik, yang bisa berdampak lebih serius bagi keberlanjutan hidup kekayaan bahari dan masa depan negeri ini.

Pertanyaan logis yang berada di benak kita, apakah nantinya kekayaan laut juga akan habis dan mengalamai kerusakan parah seperti kekayaan hutan setelah dirusak, dijarah, atau didehumanisasikan oleh manusia? Apakah di tahun 2011 ini, masyarakat mampu menyelamatkan kekayaan laut negeri ini? Akankah manusia Indonesia mencapai tahap kesadarannya kalau selama ini sudah membuat banyak kerusakan terhadap sumberdaya bangsa?

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M. Riza Damanik menyatakan, potensi kerugian akibat praktik pencurian ikandan penangkapan ikan ilegal setiap tahun ditaksir mencapai Rp. 80 triliun. Kerugian tersebut terdiri dari potensi ikan yan hilang mencapai Rp. 30 triliun dan kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 50 triliun setiap tahun. Proteksi terhadap sumber kekayaan laut Indonesia masih tidak optimal dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Persoalan pencurian ikan atau kekayaan laut bukan lagi atas nama perusahaan dan pribadi, namun sudah melibatkan pemerintahan. Maraknya pencurian ikan di laut indonesia juga menunjukkan kalau